

PANCASILA

SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

DAN SISTEM ETIKA POLITIK

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Etimologi *philein* - bahasa Yunani : cinta, *sophos* : hikmah atau kebijaksanaan → cinta kebijaksanaan

Sebagai sistem filsafat terkait dengan manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan sebagainya.

Arti filsafat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- **Filsafat sebagai PRODUK** - Jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat atau mencari kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal;
Suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dsb.
- **Filsafat sebagai suatu PROSES**, yang diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan masalah menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan obyek.
→ filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis.

RUMUSAN PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM

Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

Kesatuan Sila-sila Pancasila yang bersifat organis

- **Pancasila**: suatu kesatuan yang majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya, diantara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.
- Inti dan isi Pancasila adalah **Manusia monopluralis** yang memiliki unsur-unsur *susunan kodrat* (jasmani – rohani), *sifat kodrat* (individu-makhluk sosial), *kedudukan kodrat* sebagai pribadi berdiri sendiri, yaitu makhluk Tuhan YME.
- Unsur-unsur hakekat manusia merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis, dan setiap unsur memiliki fungsi masing-masing namun saling berhubungan.
→ Pancasila merupakan penjelmaan hakekat manusia monopluralis sebagai kesatuan organis

SUSUNAN PANCASILA HIERARKIS & PIRAMIDA



Hierarki: urutan **luas (kuantitas)** & sifat **isinya (kualitas)**.



Berdasarkan susunan hierarkis piramida:
sila pertama menjadi basis keempat sila lainnya.



Ketuhanan YME ~ Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan sosial.



Hakekat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan
TUHAN, MANUSIA, SATU, RAKYAT, DAN ADIL.



Hakekat Pancasila sebagai dasar filsafat negara:
kesesuaian antara hakekat nilai Pancasila dengan negara dalam pengertian sebab-akibat, yaitu pada sila:
ketuhanan, sifat & keadaan negara sesuai hakekat **tuhan**;
kemanusiaan, sifat & keadaan negara sesuai hakekat **manusia**;
persatuan, sifat & keadaan negara sesuai hakekat **satu**;
kerakyatan, sifat & keadaan negara sesuai hakekat **rakyat**;
keadilan, sifat & keadaan negara sesuai hakekat **adil**.

RUMUSAN YANG HIERARKIS & PIRAMIDA



Hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang membentuk persatuan, mendirikan negara dan persatuan manusia dalam satu wilayah disebut **rakyat**, yang ingin mewujudkan suatu tujuan bersama, yaitu **keadilan** dalam suatu persatuan hidup masyarakat negara.



Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mendukung kualitas masing-masing sila.

KESATUAN SILA - SILA PANCASILA



Dasar Antropologis: manusia adalah monopluralis.

Pendukung negara : rakyat, unsur rakyat adalah manusia



Dasar Epistemologis: terkait dengan konsep dasar hakekat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan - terdiri dari **sumber** (nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia) dan **susunan** pengetahuan (bersifat formal dan logis, berkaitan dengan kualitas & kuantitas). Susunan isi Pancasila bersifat universal, kolektif, khusus dan konkrit.



Dasar Aksiologis: pandangan obyektivitas terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan



Tingkatan nilai Pancasila: nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian



Pancasila memiliki nilai-nilai kerohanian yang mengakui **nilai material** dan **nilai vital**, yang keseluruhannya bersifat **sistematik-hierarkhis**

KESATUAN SILA-SILA PANCASILA

 Pancasila merupakan norma

 Aktualisasi Pancasila merupakan realisasi konkrit

 Substansi Pancasila yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan **suatu sistem nilai**

 Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu merupakan cita-cita yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

 Prinsip dasar tersebut menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat, dan tertib kehidupan bangsa Indonesia yang ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan, dan kehidupan keagamaan bangsa Indonesia

PANCASILA :
NILAI-NILAI BERSIFAT SISTEMATIS,
FUNDAMENTAL DAN MENYELURUH



FILSAFAT HIDUP BANGSA



DASAR FILSAFAT NEGARA

NILAI PANCASILA

NILAI PANCASILA YANG BERSIFAT OBYEKTIF

- ✉ Rumusan: makna terdalam; menunjukkan sifat-sifat umum yang universal & abstrak
- ✉ Inti nilai: tetap ada sepanjang masa dalam bangsa Indonesia
- ✉ Dalam Pembukaan UUD 1945: Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental, merupakan sumber hukum positif; berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi

NILAI PANCASILA YANG BERSIFAT SUBYEKTIF

- ✉ Hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia
- ✉ Jati diri bangsa; sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- ✉ Nilai-nilai kerohanian: nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius

Pokok – pokok pikiran

NEGARA INDONESIA ADALAH
NEGARA PERSATUAN (*sila ke-3*)

NEGARA HENDAK MEWUJUDKAN
SUATU KEADILAN SOSIAL
BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA (*sila ke-5*)

NEGARA BERKEDAULATAN
RAKYAT (*sila ke-4*)

NEGARA BERDASARKAN
ATAS KETUHANAN YME (*sila ke-1*)

KETUHANAN YME BERDASARKAN
KEMANUSIAAN YANG ADIL
DAN BERADAB (*sila ke-2*).

NILAI PANCASILA

landasan, dasar,
dan motivasi
dalam
bermasyarakat,
berbangsa &
bernegara

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK

Pancasila sebagai pedoman **sistem norma**:

- (a) **Norma moral** : berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, yang selanjutnya dijabarkan dalam suatu norma – norma moralitas atau norma-norma etika;
- (b) **Norma hukum** : suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang selanjutnya dikatakan Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

PENGERTIAN ETIKA, NILAI, NORMA, DAN MORAL

- ETIKA : suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral
 - a. Kelompok **etika umum** dan **etika khusus**
 - b. Etika khusus : **etika individual** & **etika sosial**
- NILAI : sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek, bukan obyek itu sendiri
- NORMA : aturan tingkah laku yang ideal
- Bermakna **NORMATIF** berarti bahwa sesuatu yang ideal harus diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta.
- MORAL mengandung pengertian integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya.

PENGELOMPOKKAN NILAI BERDASARKAN TINGKATAN

I. TERDIRI DARI 4 KELOMPOK:

- a. **Nilai kenikmatan** – nilai penyebab orang senang atau menderita
- b. **Nilai kehidupan** – nilai yang penting bagi kehidupan
- c. **Nilai kejiwaan** – nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani dan lingkungan
- d. **Nilai kerokhanian** – nilai suci dan tidak suci, terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi

II. TERDIRI DARI 3 KELOMPOK

- a. **Nilai material** – segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia
- b. **Nilai vital** – segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan
- c. **Nilai kerokhanian** – segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

PENGELOMPOKKAN NILAI BERDASARKAN TINGKATAN

- I. **NILAI KEROKHANIAN DIBEDAKAN ATAS :**
 - a. **Nilai kebenaran** - bersumber pada akal
 - b. **Nilai keindahan** (nilai estetis) - bersumber pada unsur perasaan
 - c. **Nilai kebaikan** atau nilai moral - bersumber pada unsur kehendak
 - d. **Nilai religius** (nilai kerokhanian) tertinggi dan mutlak - bersumber pada kepercayaan/keyakinan
- II. **NILAI-NILAI PANCASILA**
 - a. **Nilai dasar** (bersifat tetap) : hakekat, esensi, intisari
 - b. **Nilai instrumental** (bersifat dinamis): pedoman yang dapat diukur dan diarahkan
 - c. **Nilai praksis** (bersifat dinamis): nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (wujud boleh berbeda namun tidak bertentangan)

HUBUNGAN NILAI, NORMA, DAN MORAL

1. **Nilai** : kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (lahir & bathin)
 - * Nilai bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia;
 - * Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan bathiniah manusia
 - * Nilai dapat bersifat subyektif bila diberikan oleh subyek, dan bersifat obyektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas dari penilaian manusia
2. **Norma** : wujud konkrit dari nilai, yang menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Norma hukum merupakan norma yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum
3. **Nilai dan norma** senantiasa berkaitan dengan moral dan etika
4. **Makna moral** yang terkandung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan tingkah lakunya → norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia.
5. **Moral dan etika** sangat erat hubungannya. Etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.

ETIKA POLITIK

Etika politik meletakkan dasar fundamental manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya → Aktualisasi etika politik harus senantiasa berdasarkan pada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

- Politik dari kata "politics" – bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, meliputi proses penentuan tujuan dari sistem, dan pelaksanaan tujuan.
- Pelaksanaan tujuan memerlukan kebijakan umum, dan pelaksanaan kebijakan memerlukan suatu kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.
- Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (bukan tujuan pribadi) dan kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat, perseorangan
- Secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian, serta alokasi.

DIMENSI POLITIS MANUSIA

- ✉ **Paham individualis** (cikal bakal paham liberalis) memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas
- ✉ **Paham kolektivisme** (cikal bakal sosialisme dan komunisme) memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial saja, sebaliknya individu dipandang sekedar sarana bagi masyarakat.
- ✉ **Pancasila** memandang manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial, sehingga sifat dan ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas individualistis ataupun sosialistis, melainkan monodualistis
- ✉ **Secara moralitas** negara bukanlah untuk tujuan kepentingan individu atau untuk tujuan kolektivitas saja, melainkan untuk tujuan bersama, meliputi kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara bersama
- ✉ Pancasila merupakan **basis moralitas bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara**, artinya segala keputusan, kebijakan serta arah dari tujuan negara Indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada dasar-dasar Pancasila.

DIMENSI POLITIS KEHIDUPAN MANUSIA

- ✉ **Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial**, mencakup lingkaran kelembagaan hukum & negara, sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi manusia
- ✉ **Dimensi politis** memiliki **dua segi fundamental**:
 - (a) pengertian dan kehendak untuk bertindak;
 - (b) tindakan moral manusia
- ✉ **Hukum dan kekuasaan negara** merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik:
 - (a) hukum sebagai penataan masyarakat secara normatif;
 - (b) kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif → sesuai dengan struktur sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial
- ✉ **Negara** tanpa tatanan hukum sama dengan kekuasaan tanpa pembatasan, sehingga akan terjadi penindasan manusia, yang dikenal dengan negara otoriterianisme
- ✉ **Etika politik** berkaitan dengan obyek **forma etika**, yaitu tinjauan berdasarkan prinsip dasar etika terhadap **obyek materia** politik, meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan & penilaian kritis terhadap legitimasi tersebut

NILAI PANCASILA SEBAGAI SUMBER ETIKA POLITIK

1. SILA I - kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, tetapi legitimasi hukum dan demokrasi. Sila 1 berkaitan dengan **legitimasi moral**
2. SILA 2 dan 3 – sumber nilai moralitas dalam kehidupan negara. Azas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum, dan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
3. SILA 4 – pelaksanaan politik praktis berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus didasarkan pada legitimasi dari rakyat atau memiliki **legitimasi demokratis**
4. SILA 5 – setiap individu harus ikut terlibat secara nyata dalam pelaksanaan pemerintahan negara.
Sila 5: **legitimasi moral**
 - Semua pihak harus menyadari bahwa suatu kebijakan selain harus memenuhi **legitimasi hukum**, dan **legitimasi demokratis**, juga harus didasarkan pada **legitimasi moral**

ETIKA POLITIK DALAM PEMERINTAHAN

ETIKA POLITIK DALAM PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA MENUNTUT AGAR KEKUASAAN DALAM NEGARA DIJALANKAN SESUAI DENGAN:

1. Azas legalitas (legitiminasi hukum):
dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku
2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitiminasi demokratis);
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan (legitiminasi moral).

PRINSIP ETIS DALAM KEHIDUPAN POLITIK

1. Menghargai dan memajukan kebebasan

Tindakan politik harus diarahkan bagi perwujudan dan perluasan kebebasan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi hukum harus dapat menjamin kebebasan manusia.

2. Kemanusiaan

Kehidupan politik adalah usaha manusia untuk membangun kehidupan bersama yang lebih manusiawi. Diharapkan manusia menjadi lebih baik, lebih menghayati kemanusiaannya.

3. Memupuk modal sosial

Tindakan politik harus mengusahakan komunitas kebersamaan, yaitu bangsa dan negara tetap utuh, dapat mewujudkan dirinya, identitas dan hak-haknya.

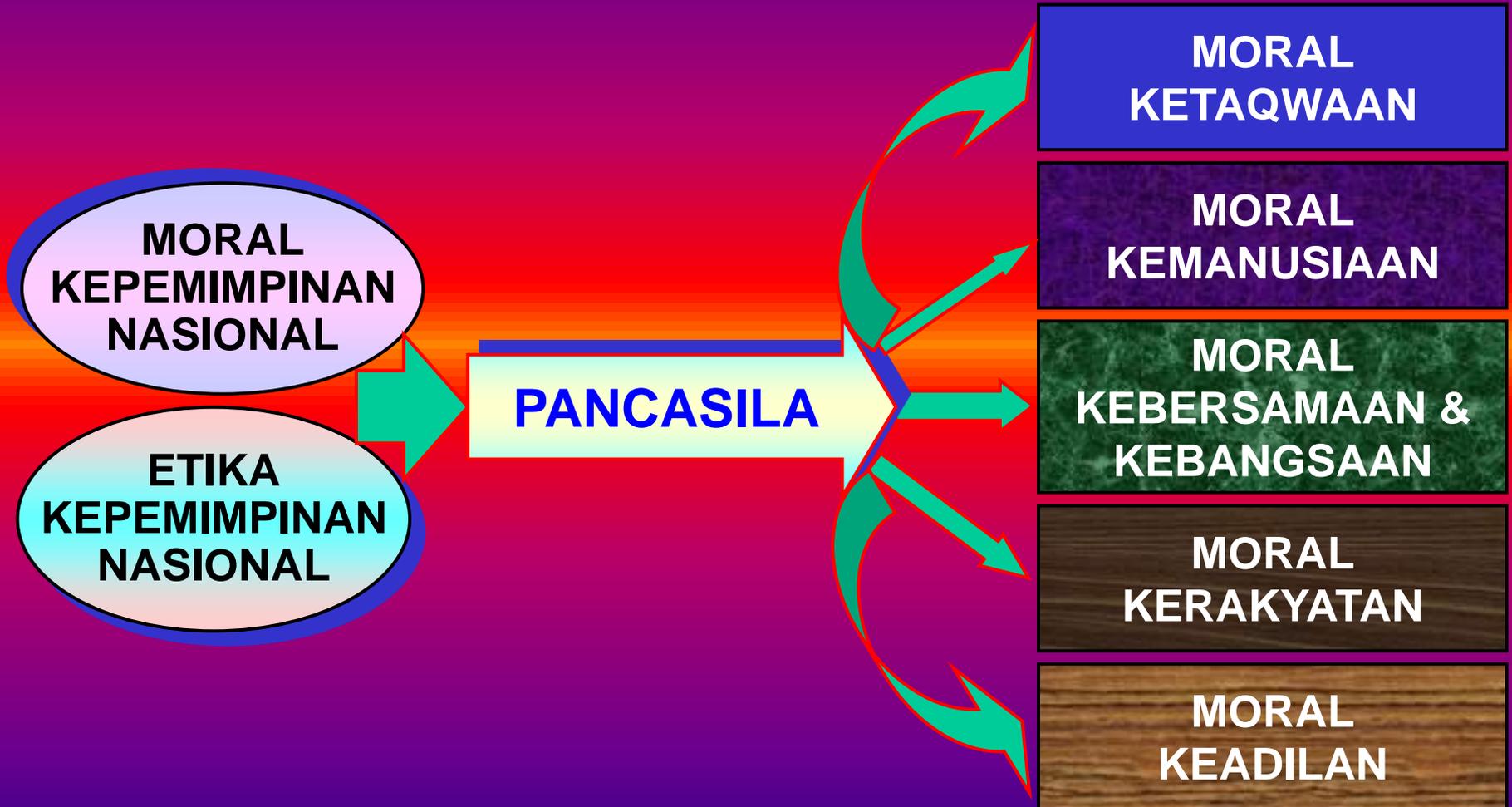
4. Kesamaan

Demokrasi tidak dapat bertahan bila tidak memadukan kesamaan dan kebebasan, serta mempersatukan keduanya atas nama persaudaraan.

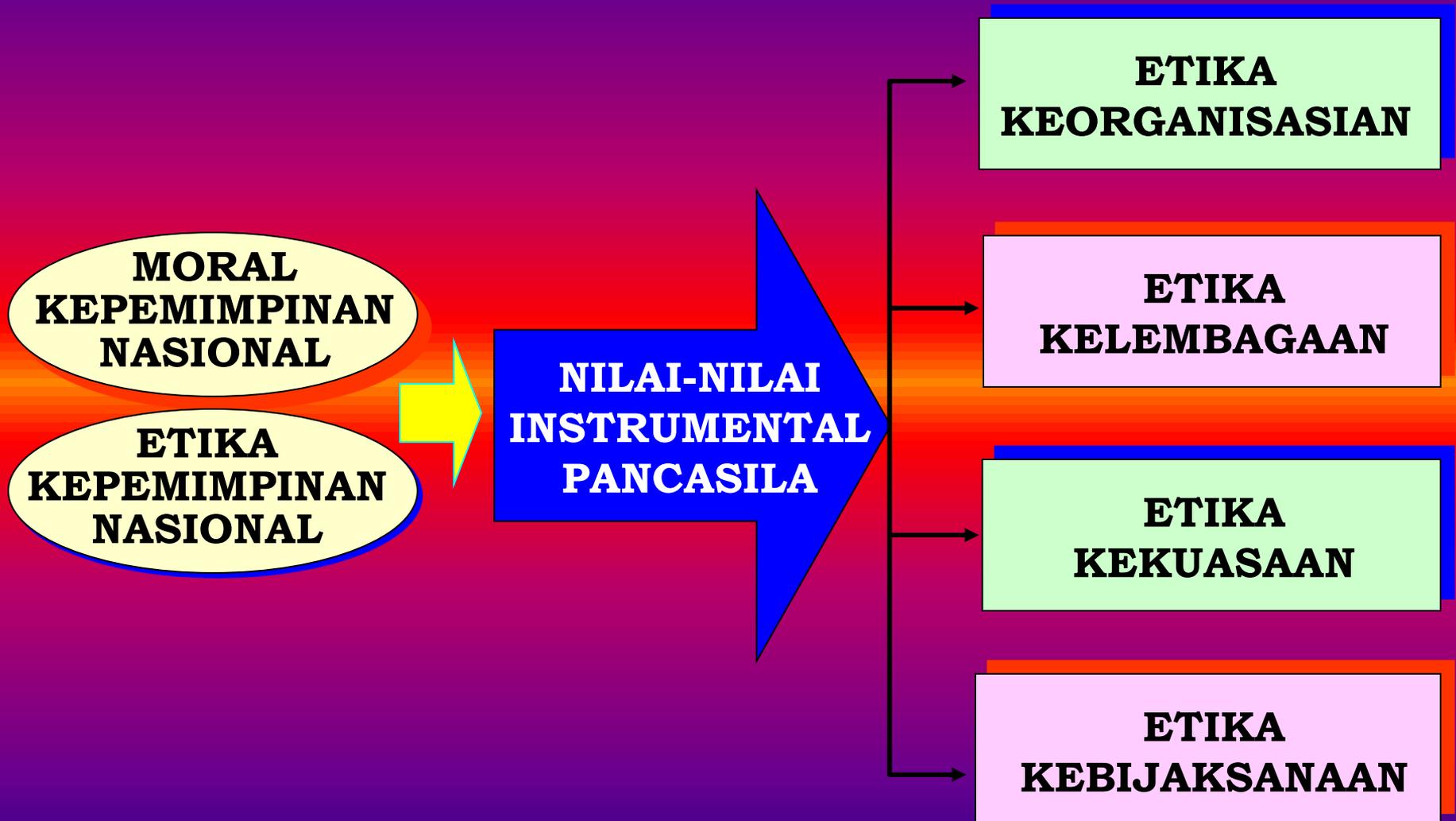
5. Keadilan sosial

Keadilan sosial merupakan alasan manusia membentuk negara dan bersatu dalam wadah bangsa, dan diperlukan bagi perwujudan kemampuan individual & komunikasi serta kerjasama kolektif.

MORAL dan ETIKA KEPEMIMPINAN NASIONAL



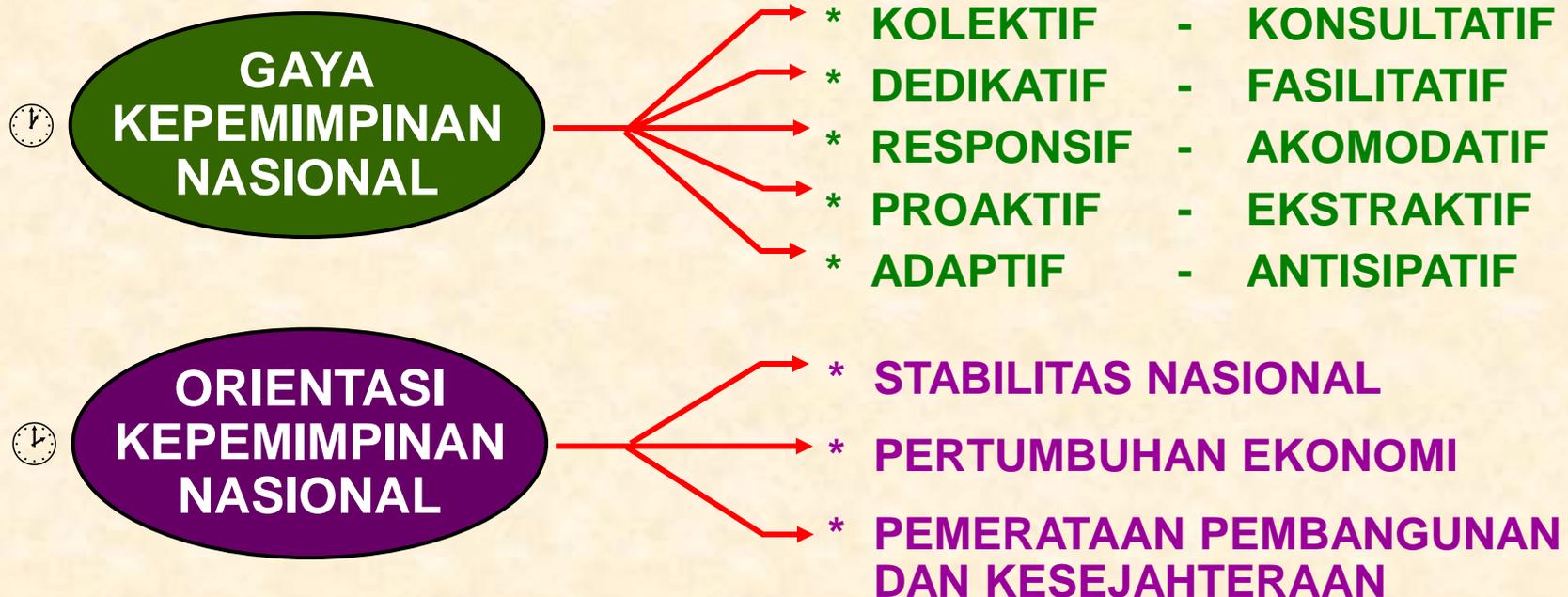
MORAL dan ETIKA KEPEMIMPINAN NASIONAL



GAYA dan ORIENTASI KEPEMIMPINAN NASIONAL

MENURUT GABRIEL A. ALMOND :

- ☞ GAYA YG BERORIENTASI IDEOLOGI (*IDEOLOGY ORIENTED STYLE*)
- ☞ GAYA YG BERORIENTASI FRAGMATIK (*PRAGMATIC ORIENTED STYLE*)
- ☞ GAYA YG BERORIENTASI NILAI-NILAI ABSOLUT TRADISIONAL (*ABSOLUTE VALUE AND TRADITIONAL ORIENTED STYLE*)



**GAYA
KEPEMIMPINAN
NASIONAL**

**SALING
TERKAIT
DAN
MENDUKUNG**

**ORIENTASI
KEPEMIMPINAN
NASIONAL**

**MORAL & ETIKA
KEPEMIMPINAN
NASIONAL**



**WASANTARA
&
TANNAS**

PARADIGMA NASIONAL

- * PANCASILA
- * UUD 1945
- * WASANTARA
- * TANNAS
- * Visi & Misi

KERANGKA IDEAL-NORMATIF KEPEMIMPINAN NASIONAL

GAYA & ORIENTASI

EKONOMI

POLITIK

KEPEMP NEGARA

KEPEMP POLITIK

SOSBUD

HANKAM

MORAL & ETIKA

KEPEMP SOSIAL

- * KETAQWAAN
- * KEBERSAMAAN
- * KETERBUKAAN
- * KONSISTENSI
- * KEPASTIAN HUK

JUJUR ADIL TG. JAWAB

LINGKUNGAN STRATEGIS

MASYARAKAT

INTERNAL

- ☒ LANDASAN IDEOLOGI SAMA
- ☒ KETERBUKAAN/KEBEBASAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
- ☒ SESUAI PER-UU-AN
- ☒ PERSAMAANKEHENDAK DAN KEPENTINGAN

KREDIBILITAS
KEMANDIRIAN
KEUNGGULAN

**KONDISI
PENDUKUNG**

EKSTERNAL

- ☒ KESATUAN POLA PIKIR, SIKAP, TINDAK
- ☒ LINGKUNGAN STRATEGIS SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN (UNTUK KESEJAHTERAAN/KEAMANAN)





PENUTUP (1)

FENOMENA PENGALAMAN

1. Pada masa Orde Baru, politik kebangsaan dilaksanakan melalui desiminasi Pancasila yang cenderung di ideologisasikan melalui homogenisasi budaya dengan dominasi kebudayaan Jawa, birokratisasi dan penyeragaman struktur pemerintahan sampai ke desa-desa, sehingga ciri-ciri khas setempat hilang
2. Ancaman terhadap NKRI dihadapi dengan cara **koersif** melalui kekuatan militer dan **persuasif** melalui berbagai indoktrinasi
3. Negara merupakan ekspresi politik dari bangsa. Sebagai masyarakat multikultural, bangsa Indonesia perlu melakukan rekonsiliasi politik nasionalisme yang cenderung mengarah kepada homogenisasi, dan melakukan politik multikultural yang mengakui dan memberi tempat pada pengembangan beragam budaya.

PENUTUP (2)

4. Politik sebagai dimensi kehidupan tidak dapat dihindari, karena segala kegiatan mengandalkan kerangka negara & masyarakat, dan berbagai masalah yang dihadapi dunia modern tidak dapat diselesaikan dengan meninggalkan politik. Justru transformasi politik perlu dilakukan agar kehidupan manusia dapat dibentuk dan dikelola.
5. Faktor konflik di Indonesia yang masih dirasakan sampai saat ini terutama dikotomi politik, ekonomi dan kultural. Perlu dilakukan penempatan kesatuan masyarakat dalam kehidupan politik yang diterima bersama, terutama yang tidak dalam adat dan praktek budaya tertentu
6. Untuk mengatasi kemerosotan moral dan kemerosotan politik yang dirasakan oleh banyak pihak, perlu ditempuh upaya mengembalikan keterkaitan antara politik, demokrasi dan etika